

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI AKHIR APRIL 2012

Akhir April 2012 ini, akan digambarkan agenda Rapat-rapat DPR Masa Sidang IV tahun Sidang 2011-2012, inventarisasi berbagai RUU yang menjadi tugas Komisi-Komisi, Pansus dan Baleg untuk diselesaikan. Juga rencana pelaksanaan fungsi anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

ALOKASI WAKTU

Masa Sidang IV 2011-2012 ini, sidang dibuka pada tanggal 14 Mei dan ditutup pada 13 Juli 2012, berjumlah 43 hari kerja atau 61 hari kalender. Karakteristik masa persidangan ke-4 adalah [1] bidang legislasi, Komisi/baleg menyusun Draft RUU usul inisiatif sesuai prioritas Program legislasi nasional tahun 2012 dan kegiatan dalam bidang legislasi lainnya. [2] bidang anggaran, adalah pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2013. [3] pelaksanaan tugas Tim yaitu: tim pengawas tindaklanjut Rekomendasi penitias Angket DPR-RI tentang pengusutan Kasus Bank Century, dan tim pengawas terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria. [4]

pejabat-pejabat publik yang akan diproses pada Masa Sidang IV, antara lain: Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) untuk melengkapi 9 calon yang ditentukan; [5] kegiatan-kegiatan lain seperti menerima delegasi parlemen negara-negara sahabat, tamu resmi dan tidak resmi pimpinan negara sahabat yang berkunjung ke DPR; rencana kunjungan Presiden Portugal tanggal 23 Mei 2012; dan Ketua Parlemen Singapura antara tanggal 21—25 Mei 2012.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Dua RUU yang dipending dalam pengambilan keputusan tingkat I dan II dalam Masa Sidang III yaitu: RUU Pendidikan Tinggi dan RUU Pendidikan Kedokteran, diselesaikan dalam Masa Sidang IV.

Lima (5) draft RUU yang sudah disetujui Rapat Paripurna menjadi RUU-DPR RI menunggu keputusan penugasan oleh Badan Musyawarah yaitu: RUU tentang Perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan empat (4) RUU inisiatif dari Badan Legislasi yaitu: RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



Rumah Tangga; RUU tentang Mahkamah Agung; RUU tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan; RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sembilanbelas (19) RUU Pembentukan Daerah Otonom baru atas usul Komisi II sudah disetujui Rapat Paripurna yaitu: satu (1) RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan delapanbelas (18) RUU Pembentukan Kabupaten/Kota. RUU-RUU ini telah disampaikan ke Presiden untuk mendapatkan Surat Presiden.

Dua (2) RUU Ratifikasi oleh Komisi I dan dua (2) RUU Ratifikasi oleh Komisi VIII, akan diproses dalam Masa Sidang IV ini.

Tujuh (7) RUU yang sudah diperpanjang masa tugasnya oleh Rapat Paripurna. Pimpinan meminta serius untuk segera diprioritaskan yaitu: RUU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta; RUU Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar (P3L); RUU tentang Sistem Peradilan Anak; RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro; RUU tentang Koperasi; dan RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah.

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial telah disahkan dalam Masa Sidang III menjelang akhir masa sidang. Walaupun ada resistensi dari sebagian masyarakat terhadap RUU ini, namun Paripurna DPR tetap memberikan persetujuan terhadap draft RUU untuk disahkan menjadi UU. Pentingnya RUU ini untuk segera diundangkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: berbagai upaya penanganan konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah, kerangka regulasi yang ada

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



mencakup tiga strategi: [1] kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. [2] kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda. [3] kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proes hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk didalamnya Ketetapan MPR (TAP MPR).

Berdasar pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya UU tentang penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis antara lain berkaitan dengan jaminan tetap eksisnya cita-cita pembentukan NKRI, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat. Tujuan NKRI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat UUD 1945.

Argumentasi sosiologis antara lain bahwa pembentukan UU tentang Penanganan Konflik Sosial diperuntukkan bagi NKRI yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama dan budaya yang masih diwarnai ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan konflik di tengah masyarakat. Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi demokrasi dan pemerintahan membuka peluang bagi munculnya gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing yang sangat rawan dan berpotensi menimbulkan konflik.

Argumentasi yuridis, pembentukan UU tentang Penanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan terkait penanganan konflik yang masih bersifat sektoral dan reaktif dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Fokus kepada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Tata Tertib DPR pasal 152. Karena bertepatan dengan rangkaian hari libur, maka DPR mengagendakan Rapat Paripurna Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 tanggal 16 Mei 2012. Dan proses lebih lanjut telah diagendakan dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat komisi dengan pasangan kerja mulai intens membahas RAPBN 2013 (bersifat kualitatif), selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran. Pada tahap akhir Badan Anggaran menyampaikan lapo-

rannya kepada Rapat Paripurna akhir Masa Sidang IV. Inilah yang dinamakan siklus APBN, yang harus dilalui sesuai prosedur dan mekanisme Dewan.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Dalam Masa Sidang III, BPK-RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pidato Penutupan Masa Sidang III, maka Pimpinan Dewan sangat mengharapkan laporan ini sesuai perintah UU untuk ditindaklanjuti BAKN sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang menjadi ujung tombak di dalam menganalisa, menelaah atas temuan sebagaimana laporan BPK RI tersebut.

Hasil telaahan tersebut menjadi bahan bagi komisi-komisi Dewan untuk ditindaklanjuti, sebagai bentuk pengawasan Dewan khususnya pengawasan terhadap pengelolaan APBN. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Century perlu mendapat perhatian KPK sesuai keputusan hasil-rapat Masa Sidang III yang lalu.

Satu Tim lagi yang diharapkan bekerja dengan baik adalah Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria.

KUNJUNGAN KERJA PADA SAAT RESES

Pada Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Komisi I sampai XI tanggal 14 Maret 2012, telah menyepakati Rencana Kunjungan kerja Komisi I sampai XI pada reses Masa Persidangan III 2011-2012. Penetapan daerah kunjungan kerja dapat dilihat pada tabel.

No.	Komisi	Provinsi tujuan Kunker
1.	I.	Bengkulu dan Kalimantan Tengah
2.	II.	Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara
3.	III.	Lampung, Bangka Belitung dan Kalimantan Barat
4.	IV.	Maluku, Riau dan Kalimantan Tengah
5.	V.	Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur
6.	VI.	DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah
7.	VII.	Papua Barat dan Sulawesi Barat
8.	VIII.	Lampung, Bengkulu dan Gorontalo
9.	IX.	DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Papua Barat
10.	X.	Maluku, DI Yogyakarta dan Riau
11.	XI.	Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur

Sedangkan Provinsi yang tidak menjadi daerah kunjungan kerja Komisi-Komisi pada reses Masa Persidangan III tahun sidang 2011-2012 adalah: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Papua.*

BURT Segera Susun SOP Fungsi Pengawasan Dewan

Wakil Ketua BURT Indrawati Sukadis mengatakan, perlu segera disusun mekanisme “Standar Operating Procedure” atau SOP yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR terhadap pengelolaan APBN.



Wakil Ketua BURT Refrizal (kanan) saat bersama pakar ekonomi UGM Anggito Abimanyu



Menurut, Indrawati, penguatan fungsi pengawasan tersebut mencakup, pengembangan pola fungsi pengawasan, penguatan strategi, infrastruktur dengan membangun data base, dan penguatan anggaran untuk melakukan fungsi pengawasan.

“Sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD kewenangan Komisi dalam melakukan fungsi pengawasan perlu diperkuat. Untuk itu perlu dilakukan workshop lanjutan dalam rangka memperkuat kewenangan DPR RI secara kelembagaan, sehingga mampu melakukan

fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan APBN,” ujar Indrawati Sukadis.

Sementara, Pakar Ekonomi dari Universitas Gajah Mada Anggito Abimanyu mengatakan, adanya catatan bagi DPR dalam mengembangkan citranya, yaitu menyusun mekanisme terkait fungsinya bersama dengan pemerintah.

“Suatu catatan bersama bagi DPR dalam mengembangkan citra, untuk melakukan perbaikan seperti dari mekanisme DPR dalam menjalankan fungsinya, serta adanya kesadaran untuk memperbaiki dari dalam diri, maka melalui workshop ini adalah suatu upaya mengajak orang luar untuk memperbaiki DPR itu sendiri,” jelas Anggito Abimanyu.

Belum lama ini, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengadakan Workshop dengan tema, Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pengelolaan APBN di Provinsi Bali, workshop tersebut bertujuan membahas penguatan dan mengembangkan fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan.

Tim dipimpin wakil ketua BURT, Indrawati Sukadis (F-PD) dengan anggota, Maimara Tando, Agung Budi Santoso, Heriyanto, Usmawarnie Pieter, A.P.A Timo Pangerang, Lucy Kurniasari, Ferrari Romawi, Muslim dan Bahrum Daido (F-PD), Josef A. Nae Soi, Riswan Tony, Eldi Suwandi, Hernani Hurustiati, Oelfah A. Syahrullah, Gandung Pardi-man, Adi Sukemi, dan Zulfadli (F-PG). Mangara M. Siahaan, Djuwarta, Sadar-estuwati, Indah Kurnia, I Made Urip, I Gusti Agung Rai Wirajaya (F-PDIP), Hermanto, Refrizal, dan Nabel Al Musawa (F-PKS), Amran (F-PAN), Irna Narulita (F-PPP), Otong Abdurrahman dan Dedi Wahidi (F-PKB). (Don.Tvp)

Dinas Pariwisata DIY Diminta Kembangkan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta lebih mengembangkan ekonomi kreatif selain pariwisata sebagai produk unggulan di daerah tersebut.

Hal itu mengemuka saat Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DIY, Rabu (25/4) yang dipimpin Ketua Komisi X H. Mahyuddin.

Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Itet Tridjati Sumarijanto mengatakan, ekonomi kreatif ini harus dapat berjalan beringan dengan kemajuan pariwisata di provinsi ini.

Sehingga, katanya, perkembangan pariwisata itu juga dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat sekitar dengan mengembangkan ekonomi kreatif.

Itet mengatakan, pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif satu sama lain sangat berkaitan erat. Ekonomi kreatif merupakan potensi riil di DIY sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik. "Ini harus terus digali dan dikembangkan sehingga punya potensi besar bagi masyarakat sekitar," katanya.

Di samping itu, karakter masyarakat DIY yang mempunyai keterampilan dalam hal seni budaya merupakan modal dalam meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

Jadi, katanya, rasanya tidak akan kekurangan potensi yang bisa digali di provinsi ini dari potensi wisata, seni, maupun budaya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan dapat menyumbangkan devisa kepada negara.

Seperti ketika Komisi X DPR mengunjungi Kasongan di daerah Bantul yang terkenal sebagai sentra industri kerajinan gerabah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurut Itet, produk yang dihasilkan tersebut cukup kreatif dengan disain-disain yang mengagumkan. Namun sayangnya, mereka banyak memerlukan pemasarannya. Untuk urusan marketing ini, seharusnya Dinas



Anggota Komisi X DPR, Itet Tridjati Sumarijanto

Pariwisata setempat dapat membantu memasarkan produk-produk tersebut.

Daerah Kasongan Yogyakarta dikenal sebagai sentra industri kerajinan gerabah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Letaknya di Kabupaten Bantul dan jarak yang ditempuh dari Kota Yogyakarta tidak memakan waktu lama. Jadi, Kasongan ini sangat tepat dikunjungi, karena kita akan melihat langsung disain-disain indah yang dihasilkan oleh seniman-seniman Bantul yang tidak kalah menariknya dengan seniman dari daerah lain.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DIY Tazbir Abdullah mengatakan, ekonomi kreatif merupakan bagian yang tak terpisahkan di DIY karena DIY merupakan salah satu basis ekonomi kreatif.

Kemampuan mengolah seni dan budaya menjadi asset pariwisata dan menjadi salah satu andalan DIY dalam meningkatkan sektor pariwisata.

Tazbir menambahkan, ekonomi kreatif merupakan alternatif pendapatan masyarakat DIY. Adanya ekonomi kreatif akan semakin melengkapi DIY sebagai salah satu destinasi wisata andalan.

Beberapa upaya telah dilakukan

Pemerintah Provinsi DIY antara lain menggelar berbagai event promosi, pembinaan, pembinaan SDM kepada masyarakat juga kelompok seni budaya dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan produktifitas penggiat ekonomi kreatif, kata Tazbir, telah dilakukan antara lain melalui pelatihan-pelatihan SDM baik yang diselenggarakan pusat/daerah.

Selain itu, memberikan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja, Disperindagkop. Dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak memberikan pelatihan sendiri karena tidak mempunyai lembaga pelatihan.

Usai mengunjungi Kasongan, Komisi X DPR RI meneruskan kunjungannya ke Kotagede untuk melakukan ziarah ke makam Sultan Agung dan makam Raja-raja Mataram.

Uniknya, sebelum memasuki makam tersebut, terlebih dulu Anggota Komisi X yang akan berziarah diwajibkan memakai kain dan beskap lengkap dengan blangkon, sedang untuk wanita diwajibkan memakai kain panjang dengan kemben. (tt) foto: parle

Komisi X DPR Dukung Maluku Jadi Pusat Pariwisata Kawasan Timur

Komisi X DPR mendukung Maluku menjadi Pusat Pariwisata Indonesia Bagian Timur.



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR di Maluku, Asman Abnur

Hal itu disampaikan Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Komisi X DPR Asman Abnur saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Maluku yang dihadiri Wakil Gubernur Said Assagaf, di ruang rapat antai VI kantor Gubernur Maluku,

Selasa (24/4) sore.

Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan, teman teman komisi X yang datang ke Propinsi Maluku akan mendukung dan membantu Maluku agar lebih maju dan dikenal oleh masyarakat luar.

Dia mengemukakan, Komisi X DPR ingin tercapai solusi dan mengimplementasikan berbagai persoalan yang ada di Maluku yakni, bidang Pariwisata, Pendidikan, ekonomi kreatif, perpustakaan dan olah raga. Pasalnya, di Maluku masih terdapat situs situs bersejarah, namun masih sangat kesulitan dari sisi promosi dan pengemasannya. "kami bertekad membantunya sehingga Maluku dapat menjadi tujuan atau lokasi wisata untuk kawasan Indonesia Timur,"ujarnya. Setelah Maluku menjadi pusat Pariwisata wilayah Indonesia Timur, paparnya, baru beranjak ketempat atau lokasi lainnya yang memiliki potensi besar seperti Raja Ampat di Papua.

Dirinya menegaskan, persoalan yang muncul di Maluku akan segera dibawa ke Jakarta dan akan dibahas dalam Rapat Komisi X dengan Menteri terkait, sehingga nantinya persoalan tersebut bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya. (Spy) foto:parle

Ketua DPR Kecewa Beredarnya Video Porno Mirip Anggota

Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kecewa dengan peredaran video porno yang mirip anggota Komisi IX DPR.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Menurut Marzuki, munculnya video itu, walau masih disebut mirip anggota DPR, dia melihat hal itu sebagai bukti kegagalan kaderisasi di partai. "Kuncinya pengkaderan di parpol, apa saja yang saya sampaikan nggak akan didengar kecu ali partai mereka," keluh Marzuki.

Dia menambahkan, Pimpinan sudah bekerja keras, fokus dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tapi anggota jalan dengan pikirannya sendiri.

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung sudah mengetahui bahwa

ada video porno mirip anggota DPR sejak lama. bahkan dia mengaku sudah mendengar soal video yang disebut-sebut melibatkan kader PDIP itu sejak 6-7 bulan lalu. "Sebenarnya saya sudah menduga atau mendengar persoalan ini, bukan hari ini saja. Sudah kurang lebih sudah 6-7 bulan lalu mengenai hal ini," kata Pram.

Pramono juga meyakini pemain video hot itu bukan kader PDIP. Pramono punya alasan kuat soal itu setelah melihat dari foto yang sudah beredar. (si)foto:wy/parle

Komisi X Dukung Pembangunan Bandara Baru DIY

Komisi X DPR RI mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun bandar udara baru.

Pembangunan bandar udara baru ini sangat urgent mengingat keterbatasan dalam akses penerbangan karena Airport lama tidak dapat dikembangkan lagi.

Dukungan ini disampaikan Komisi X DPR saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur DIY, Senin (23/4) yang dipimpin Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin.

Mahyuddin mengatakan, bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta memang sudah tidak memenuhi syarat karena selain landasannya yang sempit, juga banyaknya jadwal penerbangan.

Selain dipakai sebagai bandar udara umum, bandara Adi Sucipto juga dipakai sebagai latihan pesawat AURI, karena bandar udara ini memang milik AURI.

Begitu padatnya jadwal penerbangan di bandara yang kecil ini, sampai-sampai jika pesawat-pesawat penumpang akan melakukan pendaratan, maka dia harus berputar-putar di udara menunggu aba-aba diijinkan untuk mendarat.

Kondisi ini seringkali terjadi, bahkan ada penumpang yang mengatakan setiap dia naik pesawat ke Yogyakarta dan akan melakukan pendaratan harus berputar-putar dulu beberapa saat.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun lokal tidak mempunyai bandara yang memenuhi syarat.

Seperti disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono, salah satu kendala pariwisata di Yogyakarta karena Yogya tidak memiliki bandara yang bertaraf internasional. Padahal, katanya, Yogya merupakan daerah tujuan wisata ke dua setelah Bali.

Pasca terjadinya gempa dan erupsi gunung Merapi, sangat sulit menaikkan angka kunjungan wisatawan asing berkunjung ke Yogyakarta.



Tim Komisi X DPR RI saat pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

Penyebab salah satunya adalah para wisatawan asing tersebut enggan harus berhenti di beberapa tempat. Menurut wisatawan tersebut, banyaknya transit di beberapa tempat tidak praktis dan menghabiskan waktu. Karena seringnya transit juga membuat para wisatawan asing kelelahan.

Untuk itu, kata Sultan, pembangunan bandara baru ini sangat urgent jika kita ingin menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang akan memberikan devisa daerah yang cukup signifikan.

Wisawan asing tersebut menginginkan perlunya akses langsung, tidak banyak transit mengingat waktu liburan yang sangat terbatas.

Sultan mengatakan, bandar udara internasional ini nantinya diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan berkunjung ke Yogyakarta.

Saat ini, Angkasa Pura I sudah membidik dua calon lokasi bandara baru, yakni di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Bandara ini didesain memiliki landasan pacu

sepanjang 5.400 meter dan mampu menampung pesawat berbadan besar. Bandara ini ditargetkan memiliki kapasitas tampung 5 juta-6 juta penumpang per tahun.

Untuk melaksanakan proyek bandara senilai Rp1,2 triliun ini, Angkasa Pura I sudah menjalin kerjasama dengan GVK Power & Infrastructure, perusahaan asal India yang sukses mengelola Bandara Mumbai dan Bangalore. Keduanya sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company/JVC). Sesuai aturan, kepemilikan GVK Group dibatasi maksimal 49% di JVC sedangkan 51% dimiliki Angkasa Pura I.

Proyek bandara baru Yogyakarta sudah mencapai tahap penyelesaian studi kelayakan. Dalam tiga bulan ke depan, PT Angkasa Pura I, selaku pelaksana proyek, akan menyerahkan master plan (rencana induk) proyek ke Kementerian Perhubungan. Setelah rencana induk selesai baru tahap detail engineering design (DED), pembebasan lahan, dan baru dibangun. (tt) foto:parle

Komisi Pendidikan Akan Perjuangkan Bantuan Sekolah Korban Merapi

Komisi Pendidikan DPR RI akan memperjuangkan bantuan untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di Kabupaten Sleman akibat korban Merapi.



Rombongan Kunker Komisi X DPR yang di Pimpin oleh Mahyuddin (tengah) saat melakukan peninjauan

Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI H. Mahyuddin saat mengunjungi beberapa sekolah baik yang rusak ringan maupun rusak berat dalam serangkaian acara kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (24/4).

Sekolah-sekolah yang dikunjungi Komisi X DPR hari itu adalah SD Kanisius Babadan, SMP Muhammadiyah 2 Mlati PAUD, SMKN 1 dan SMAN 1 Cangkringan Sleman, Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa Kepala Sekolah menyampaikan, pasca erupsi gunung Merapi yang terjadi beberapa waktu lalu banyak sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Walaupun telah mendapatkan bantuan dana, namun karena tingkat kerusakannya berat, maka Pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan dana bagi kelancaran proses belajar.

Seperti disampaikan Kepala Seko-

lah SMKN 1 Mujiyono, gedung sekolah yang ditempati sekarang merupakan daerah yang tergolong rawan.

Lokasi sekolahnya, katanya, termasuk ring 1 lereng merapi. Jadi saat kejadian ada bangunan yang letaknya tidak jauh dari kelas yang ditinjau kondisinya luluh lantak.

Sekarang ini, tambahnya, semua kegiatan mengajar hanya menempati 6 (enam) lokal. Untuk itu, perlu dibuatkan gedung baru yang bebas dari bahaya erupsi, sehingga siswa dapat belajar dengan perasaan tenang tanpa dihindangi perasaan cemas sewaktu-waktu terjadi erupsi.

Mujiyono menjelaskan, SMKN 1 memiliki dua jurusan yakni Teknologi Hasil Pengolahan Pertanian dan Budi daya Peternakan. Kehadiran Komisi X DPR, katanya, diharapkan membawa secercah harapan untuk dapat mempercepat pembangunan sekolah baru.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi X Mahyuddin mengatakan,

sebaiknya pihak sekolah membuat proposal yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat.

Proposal tersebut nantinya akan disampaikan ke Pusat, dan saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X DPR akan memperjuangkan hal itu.

Mahyuddin menambahkan, SMK merupakan harapan masa depan untuk dapat menyerap tenaga kerja, dengan banyaknya pengangguran.

Oleh karena itu, kata Mahyuddin, di Tahun 2014 porsi SMK akan lebih banyak daripada SMA. Jika sebelumnya perbandingan 70 persen SMA dan 30 persen SMK, maka nantinya SMK yang 70 persen dan SMA 30 persen.

Tiap tahun, anggaran yang diberikan untuk SMK cukup besar, kurang lebih 1,9 triliun. Dan anggaran itu diantaranya juga dialokasikan untuk membangun sekolah baru. (tt) foto: tt/parle

Renovasi Stadion Mandala Krida Didukung Komisi X DPR

Komisi X DPR RI mendukung dilakukannya renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang telah direncanakan Pemerintah setempat.

Dukungan ini disampaikan saat Komisi X DPR melakukan peninjauan ke stadion tersebut, Rabu (25/4) yang dipimpin Parlindungan Hutabarat.

Parlindungan mengatakan, melihat kondisi stadion tersebut memang cukup memprihatinkan. Atap-atap stadion banyak yang bocor, bahkan ada atap yang hampir runtuh.

Jika dilihat usianya, Stadion Mandala Krida memang telah cukup lama berdiri, kurang lebih 25 tahun yang lalu.

Menurut Wakil dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY selama stadion ini berdiri belum pernah dilakukan perbaikan yang signifikan.

Untuk itu pihaknya berharap, renovasi yang dilakukan ini merupakan perbaikan besar sehingga hasilnya nanti betul-betul memuaskan serta dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi para atlet dan siap sebagai stadion nasional.

Dia menambahkan, Masyarakat Yogya khususnya para atlet beranggapan ingin memiliki stadion bertingkat nasional, yang memenuhi syarat untuk dapat dipakai pada event-event olahraga nasional.

Rencananya, renovasi stadion tersebut akan direalisasikan pada tahun 2013. Dan lapangan yang sangat memerlukan perbaikan adalah lapangan sepak bola dan lintasan atletik.

Untuk itu, katanya, melalui Komisi X DPR, pihaknya sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan renovasi itu dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Asdep Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Panca Putra Hamzah yang ikut mendampingi kunjungan saat itu mengatakan, dukungan dana untuk renovasi stadion Mandala Krida memang layak diberikan, mengingat kondisi sta-



Tim Komisi X DPR RI saat meninjau stadion Mandala Krida di Yogyakarta



dion yang memprihatinkan.

Untuk itu, dia minta Dinas setempat untuk membuat rinciannya dan disampaikan kepada Kementerian terkait dengan tembusan Komisi X DPR RI.

Diakhir kunjungan, Komisi X DPR langsung berkeliling meninjau stadion sambil melihat seberapa besar renovasi stadion ini perlu dilakukan. (tt) foto: parle

Dinas Pariwisata DIY Perlu Bina Seniman Tari

Anggota Komisi X DPR RI Parlindungan Hutabarat mengatakan, perlunya keterlibatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan pembinaan bagi seniman tari di daerah tersebut.



Rombongan Komisi X DPR saat Kunjungan Kerja di Provinsi DIY

Hal ini dikatakan usai melihat pertunjukan Sendratari Ramayana di Pura Wisata, Senin malam (23/4) dalam serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi DIY.

Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin, lebih jauh Parlindungan mengatakan, pertunjukan Sendratari Ramayana yang dipagelarkan di Jalan Brigjen Katamsa ini sangat menarik bagi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Fakta ini tidak dapat dipungkiri melihat begitu banyaknya wisatawan asing yang melihat pertunjukan tersebut.

Agar pertunjukan tersebut dapat berjalan permanen untuk masa-masa mendatang, sebaiknya ada keterlibatan langsung Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan secara berkelanjutan. “Ini pen-

ting dilakukan untuk regenerasi para penari agar generasi muda tetap menjaga kelestarian budaya daerahnya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pengelola Pura Wisata menyampaikan keluhannya sehubungan dengan sulitnya melakukan pembinaan untuk regenerasi pembinaan penari.

Untuk itu, pihaknya minta bantuan Komisi X DPR untuk menyampaikan hal ini kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Untuk sarana kami siap menyediakan,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DIY Tasbir Abdulah mengatakan, Pemda Provinsi DIY menempatkan pariwisata sebagai pilar pembangunan selalu berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata secara terus menerus dengan mempertimbangkan SDM, infrastruk-

tur maupun kesadaran masyarakat pariwisata.

Indikatornya, saat ini telah terjadi perkembangan yang menggembirakan, kesadaran masyarakat tentang pariwisata semakin baik.

Tasbir menambahkan, berdasarkan data kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara 167.565, sedangkan wisatawan nusantara 1.438.129 orang.

Sepuluh besar wisatawan mancanegara ke DIY adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Australia, Singapura, Korea Selatan, dan Inggris. Sedangkan sepuluh besar wisatawan nusantara ke DIY adalah DKI, Jateng, Jatim, Jabar, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan.(tt) foto:parle

DPR Dukung Peningkatan Kerjasama Ekonomi Dengan Hungaria

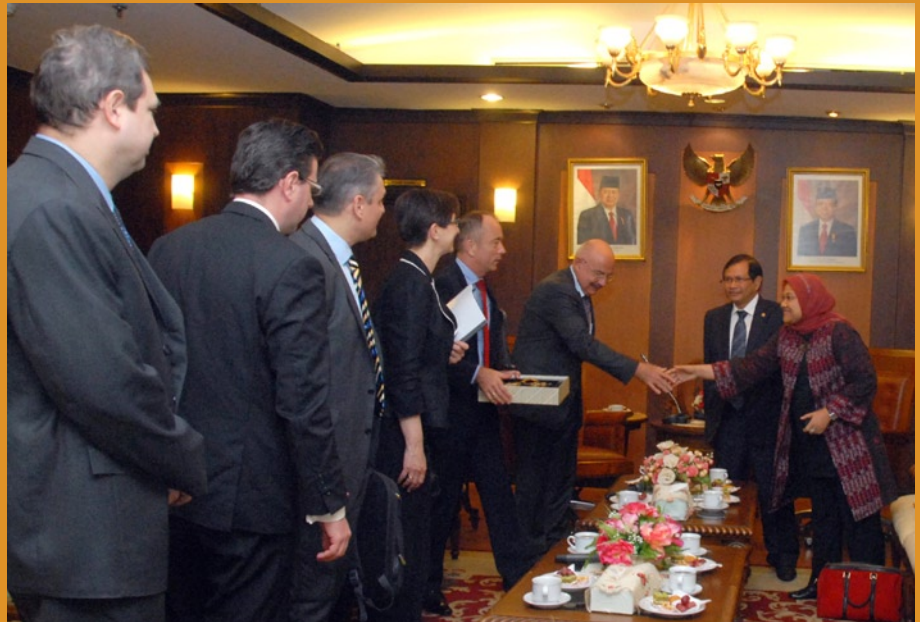
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Kunjungan Menlu Hungaria Janos Martonyi dalam rangka mendorong kerjasama kedua negara pada sektor ekonomi.pasalnya, status hubungan perdagangan kedua negara baik ekspor maupun impor masih kecil dan masih dapat ditingkatkan lagi.

“ Kita ingin mendorong peningkatan hubungan bisnis. Hungaria memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi dan water treatment, begitu juga Indonesia merupakan negara kaya SDM, maupun SDA,”ujarnya saat menerima Menlu Hungaria Janos Martonyi di ruangan Pimpinan, Rabu, (25/4).

Menurutnya, Indonesia memiliki peran penting di Asia sementara hungariapun demikian, peranannya di benua Eropa juga patut diperhitungkan. “Di dunia internasional saling mendukung. antara Hungaria dan Indonesia,”ujarnya.

Selain sektor bisnis, ujarnya, DPR mengharapkan terjalannya kerjasama pada sektor budaya seperti adanya kerjasama pengajaran kedua bahasa di Universitas kedua negara. “Saya harapkan suatu hari Universitas Indonesia ataupun Gajahmada mempunyai kelas bahasa hungaria seperti halnya pengajaran bahasa Indonesia yang sudah berjalan di Budapest,”paparnya.

Pada kesempatan itu, Janos mengatakan, Indonesia kedepan akan menjadi bangsa yang besar dan maju. Hal itu sudah terlihat dari semakin



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menerima kunjungan Menlu Hungaria Janos Martonyi

berkembangnya demokrasi, dan pertumbuhan ekonominya yang diakui oleh dunia internasional. “Dari pandangan ini, Hungaria ingin sekali menjalin kerjasama diluar Eropa yaitu Asia Pasifik termasuk Indonesia,”paparnya.

Menurutnya, Karakter kedua negara hampir sama yang membeda-

kan hanya kondisi dan pertumbuhan ekonominya. “Kita memiliki perusahaan minyak dan kita harapkan dapat menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kedua negara selain itu, Hungaria memiliki iklim politik yang cukup baik,”tambahnya.(si) foto:RY

Komisi IX Dorong Revitalisasi Balai Latihan Kerja

Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk lebih proaktif dalam melakukan perencanaan pelatihan dan rekrutmen para pencari kerja, karena masih disinyalir ada indikasi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengikuti program pelatihan yang diadakan BLK.

Hal tersebut terungkap saat tim kunjungan kerja komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke Balai Latihan Kerja di Jakarta Selatan, Selasa (17/4) kemarin.

Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang juga dihadiri jajaran Kepala BLK se-Jakarta, anggota tim kunjungan kerja komisi IX DPR RI,

Karolin Margret Natasa (F-PDI Perjuangan) mengatakan, tingginya biaya operasional ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan yang berhasil dilatih dan diserap oleh pasar.



Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR saat pertemuan dengan kepala BLK



Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR saat meninjau BLK Jakarta Selatan

“Persoalan ini masih menjadi permasalahan klasik,” tandasnya.

Karolin menambahkan, belum ada sikap proaktif dari para pengelola balai latihan kerja untuk benar-benar mencari masyarakat pencari kerja yang membutuhkan pelatihan. “Terkadang orang yang sama yang mengikuti pelatihan berkali-kali. Telalu banyak akal akalan dan kepentingan yang justru kontra produktif dengan harapan kita

terhadap balai latihan kerja,” ucap anggota DPR asal Kalimantan Barat ini.

Ketua tim kunjungan kerja komisi IX DPR RI, Soeprayitno (F-P. Gerindra) mengatakan, ketidakefisienan dan efektifitas terhadap penggunaan anggaran untuk balai latihan kerja ini masih jauh dari harapan.

“Dalam rangka membangun balai latihan kerja yang professional,

mandiri serta bermanfaat bagi masyarakat pencari kerja, komisi IX DPR RI bersama dengan Pemerintah akan mengusulkan untuk dilakukannya revitalisasi Balai Latihan Kerja”, tegas Soeprayitno.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Deded Sukandar mengatakan, di dalam masa transisi mereka memerlukan waktu untuk membimbing BLKD. Ia juga menilai bahwa BLKD ini merupakan solusi untuk merevitalisasi pengangguran. “Kita masih berkelut dalam rangka mencari jati diri, walaupun saya sudah tantang bagaimana kita jangan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutinitas, tapi juga harus memberikan terobosan-terobosan bagaimana mengatasi pengangguran yang ada di Jakarta”, ujarnya.

Namun terdapat sedikit miss communication dengan anggota legislatif di Jakarta mengenai berbagai kelemahan-kelemahan yang terdapat di BLKD ini agar diperbaiki. Seperti masalah kurangnya instruktur yang terdapat di BLKD. “Saya merasasangat miris atau merasa prihatin dengan adanya BLKD yang hanya memiliki 1 instruktur,” ungkap R. Deded Sukandar. (ton/tvp)

Komisi X Prihatinkan Minat Baca Masyarakat Yogya Rendah

Komisi X DPR RI memprihatinkan masih rendahnya minat baca masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sungguh ironis Yogya yang terkenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan, namun masyarakatnya belum memiliki minat baca yang tinggi. Bagaimana dengan kota-kota lain di Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi X Eko Hendro Purnomo saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi DIY, Senin, (23/4) di Kepatihan Yogyakarta.

Pertemuan dengan Gubernur DIY beserta jajarannya tersebut merupakan serangkaian kunjungan kerja Komisi X ke provinsi tersebut, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Yogya dalam bidang pendidikan, pariwisata, perpustakaan dan pemuda dan olah raga.

Dalam kesempatan tersebut, Eko menanyakan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat Yogya. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY Endar mengatakan, rendahnya minat baca masyarakat bukan hanya menjadi permasalahan di provinsi ini, tapi juga menjadi problem nasional.

Endar menambahkan, kondisi dan permasalahan bidang perpustakaan



Tim Komisi X DPR RI saat pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

yang harus segera diatasi oleh negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5-20 tahun yang akan datang adalah rendahnya minat baca masyarakat.

Hal ini, kata Endar, terkait erat dengan sarana, prasarana, fasilitas dan mahalannya harga buku bahan pustaka. Untuk mengatasi hal tersebut, Perpustakaan setempat dalam proses

melakukan pemetaan untuk mengetahui apa akar permasalahannya. Apakah karena koleksi bukunya yang kurang, promosi yang kurang atau sebab-sebab lainnya,” katanya.

Saat ini, kata, perpustakaan Yogya memiliki koleksi 350 ribu eksemplar, 23 ribu diantaranya koleksi langka. Untuk memenuhi referensi pustaka ditempuh dengan cara. Hunting ke berbagai daerah provinsi di Indonesia.

Adapun program bidang perpustakaan yang telah dan akan dilakukan terkait dengan UU Otonomi Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan perpustakaan di daerah dan pembudayaan minat baca masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan program tersebut antara lain telah berkembangnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat sampai ke tingkat desa, tempat ibadah, termasuk di shelter pengungsi bencana erupsi gunung Merapi. Di samping itu, memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perpustakaan menetap melalui layanan Perpustakaan Keliling. (tt) foto:tt



Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) dan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin (kiri)

Stain Harus Berperan Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Di Bengkulu

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengatakan, STAIN Bengkulu harus dapat berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan didaerahnya.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah saat memberikan cendera mata dari DPR untuk Kampus Hijau STAIN Bengkulu

Berdasarkan data Bappenas terdapat 6 kabupaten di Provinsi Bengkulu masih masuk kategori daerah tertinggal.

“Propinsi Bengkulu sebagian kabupatennya termasuk daerah tertinggal, ini salah satunya karena rendahnya indikator pembangunan sumber daya manusia. Saya kira STAIN Bengkulu perlu memberi sumbangsih untuk peningkatan kondisi masyarakat ini, ikut bertanggung jawab pada pengembangan sumber daya manusia,” kata Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah dalam pertemuan dengan civitas akademika di Kampus Hijau STAIN Bengkulu, Selasa (17/4/12).

Penentuan daerah tertinggal berdasarkan beberapa kriteria diantaranya perekonomian, sumberdaya

manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah. Ida Fauziah yang juga Ketua Komisi VIII meminta STAIN Bengkulu bekerja sama dengan pemda untuk mengirimkan alumninya ke kabupaten tertinggal fokus meningkatkan indeks sumber daya manusia.

Sementara itu anggota tim kunker dari FPKS Ledia Hanifa menyarankan untuk meningkatkan kualitas alumni, STAIN Bengkulu dengan membangun komunikasi antar perguruan tinggi ternama di Arab Saudi, Mesir dan Tunisia. “Ada beberapa bentuk kerjasama diantaranya beasiswa, kita bisa mengupayakan itu,” paparnya.

Aspirasi Peningkatan Status

Dalam pertemuan tersebut Ketua STAIN Dr.H.Sirajuddin dan beberapa

mahasiswa menyampaikan aspirasi bahwa sangat urgen meningkatkan status kampus STAIN.. “Mohon diperjuangkan aset negara ini, agar bisa ditingkatkan statusnya menjadi IAIN,” kata Hamdan Effendi Ketua BEM bersemangat.

Pada bagian lain Zulkarnaen staf pengajar mengusulkan agar Komisi VIII mendukung pemanfaatan dana abadi Haji untuk program peningkatan SDM umat. Ia berpandangan banyak yang dapat dilakukan di beberapa kabupaten tertinggal apabila dana tersebut bisa dialihkan.

Ida Fauziah menyatakan dapat menerima usulan peningkatan status STAIN menjadi IAIN. Ia meminta tim Kementerian Agama yang hadir dalam pertemuan mencatat aspirasi tersebut. Secara politis Komisi VIII menurutnya akan mendukung pembahasannya dalam rapat kerja dengan instansi terkait di DPR.

Anggota Tim Kunker dari FPG Oheo Sinapoy mengingatkan Ketua STAIN dan jajarannya dapat proaktif mengawal agar usulan peningkatan status ini benar-benar masuk dalam program utama Kementerian Agama.

“Dalam kunjungan ke lapangan kita sering menampung usulan, ternyata kemudian realisasinya sulit. Penyebabnya adalah begitu kita tampung kita tidak melihat usulan ini muncul dari pemerintah. Saya mensinyalir usulan ini tertahan di Kementerian Agama dengan dalih banyak hal. Oleh sebab itu Ketua STAIN harus agresif mengingatkan Kementerian agama. Kita tunggu usulan kementerian di Senayan, jangan sampai hilang di tengah jalan,” demikian Oheo. (iky) foto:parle

Komisi IX Kecam Penembakan TKI Di Malaysia

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengecam aksi penembakan terhadap tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dilakukan polisi Diraja Malaysia.

Irgan mengecam keras tindakan polisi Diraja Malaysia. Menurutnya, penembakan yang dilakukan polisi Diraja Malaysia terhadap TKI merupakan tindakan yang sewenang-wenang. "Saya meminta pemerintah bersikap tegas kepada Malaysia dan serius menyelidiki kasus ini," tegas Irgan.

Selain itu Irgan meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia, untuk meminta klarifikasi kepada Malaysia. "Disamping meminta klarifikasi kepada Malaysia, kita juga ingin tahu kenapa polisi Malaysia melakukan hal itu," ujarnya.

Anggota Fraksi PPP DPR RI ini menduga sangkaan praktik jual beli organ dalam kasus ini, merupakan rangkaian dari banyak kasus yang belum terungkap. "Pemerintah Indonesia harus tegas meminta penjelasan dari Malaysia," imbuhnya.

Disinyalir persoalan jual beli organ ini sudah berlangsung lama dan merupakan suatu kejahatan terorganisir dan kriminal berat. "Hal ini sudah melanggar konvensi PBB, Kita tidak perlu merengek-rengok dan harus meminta ketegasan dari Malaysia," papar Irgan.

Autopsi Ulang Tiga Jenazah TKI

Rieke Diah Pitaloka Anggota Komisi IX (F-PDIP) meminta autopsi ulang terhadap ketiga jenazah TKI asal NTB yang tewas di Malaysia.

Ditegaskan Rieke, autopsi ulang penting dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran dugaan adanya penjualan organ. Sebaiknya menurut Rieke, autopsi dilakukan di RSCM.

"Kasus penembakan TKI NTB di Malaysia harus diawasi bersama, saya minta masyarakat khususnya keluarga korban ikut aktif berperan mengawasi kasus ini," papar Rieke.

"Pemerintah kita bisa menindaklanjuti kasus ini dengan memanfaatkan UU Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran walaupun Malaysia belum meratifikasi



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz

konvensi tersebut," tambahnya. (sc) foto:parle ***

Pendidikan Karakter Harus Dibangun Sejak Dini

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan pentingnya melakukan pembangunan karakter bagi setiap individu anak bangsa sejak usia dini.

Dalam pendidikan karakter yang utama adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, religius, budaya dan kearifan lokal.

Hal ini disampaikan saat men-

jadi pembicara dalam Seminar Nasional "Pembangunan Karakter dan Kemandirian Masa Depan Bangsa" yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Pro-

gram Studi Megister Ilmu Administrasi di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (21/4/12).

"Pendidikan karakter tidak seperti kursus yang bisa dilakukan dalam 3



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) bersama Akbar Tanjung dalam acara Seminar Nasional di Universitas Diponegoro

hari. Karakter itu dibentuk sejak dini dan berkelanjutan, kalau usia mahasiswa seperti sekarang karakternya sudah jadi telah dibentuk sejak masa lalu. Dalam hal ini peran guru, orang tua dan lingkungan sangat penting," paparnya.

Ia menggarisbawahi saat ini sulit menemukan sekolah yang mampu membangun karakter yang baik siswanya. Bagian paling penting adalah menanamkan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya dan bangsa. Setelah anak memahami hal utama ini barulah kemudian diajarkan daftar panjang keilmuan lainnya.

Masalah karakter menurutnya sangat mempengaruhi kemandirian bangsa untuk maju kedepan. "Saya pernah mempertanyakan kepada pejabat Bank Indonesia kenapa bank asing begitu leluasa membuka usaha di negeri ini, mengambil uang rakyat bahkan sampai ke daerah-daerah. Sementara bank kita ketika ingin membuka cabang di negara lain sulit. Negara Swiss misalnya mereka bisa tegas tidak ada bank asing disitu," tandas politisi Partai Demokrat ini.

Ia berharap pendidikan karakter benar-benar menjadi perhatian segenap pihak terutama guru karena menentukan kemajuan bangsa. "Harus

ditemukan solusi jangan sampai masalah karakter hanya sekedar perbincangan hangat di seminar sementara karakter bangsa tidak berubah menjadi lebih baik,"ujarnya.

Bicara dalam seminar yang sama mantan Ketua DPR Akbar Tanjung mengingatkan Bung Karno pernah berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

"Ajaran yang ditemukan founding father patut kita jadikan sebagai basis pemikiran untuk menjadi bangsa mandiri. Tentu saja penjabaran oleh Bung Karno harus kita sesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang ada," lanjutnya.

Ia memberi contoh bagaimana sebagian pihak menerjemahkan berdaulat dalam politik sebagai upaya meraih kekuasaan semata. Kekuasaan menjanjikan berbagai macam keistimewaan materi, penghormatan, sehingga orang mengejarnya dengan berbagai cara. Pada akhirnya memunculkan politik transaksional, pragmatisme dalam politik.

Mantan Menpora yang saat ini mendirikan lembaga kajian Akbar Tanjung Institute ini menegaskan masalah kemandirian bangsa tidak terlepas dari pemimpin yang mampu memberi arah

pada bangsa ini. "Pemimpin itu harus mempunyai visi untuk menetapkan langkah ke depan. Pemimpin harus punya mimpi, harus bisa menyampaikan target tertentu pada rakyat," imbuhnya.

Tidak Perlu Bayar

Dalam kesempatan itu Marzuki Alie membantah kabar yang menyebutkan untuk menghadirkan Ketua DPR di kampus harus menyiapkan sejumlah uang. "Saya kaget juga tadi ada yang mengatakan untuk bisa menghadirkan Ketua DPR bicara di kampus bayar Rp.100 juta. Tidak benar itu, yang benar free of charge. Tidak pernah satu rupiah pun saya minta bayaran, datang sendiri, makanpun bayar sendiri," tekannya disambut tepuk tangan peserta seminar.

Seminar Nasional yang berlangsung di Kampus Universitas Diponegoro cukup mendapat sambutan. Peserta tidak hanya berasal dari Undip tetapi juga dari perguruan tinggi lain di Jawa Tengah, serta beberapa guru sekolah negeri maupun swasta. "Saya selalu upayakan untuk hadir kalau ada yang mengundang, asal waktunya bisa disesuaikan dengan agenda lain," demikian Marzuki. (iky) foto:parle

Komisi X DPR Harapkan Lulusan SMK Semakin Profesional

Wakil Ketua Komisi X DPR, Utut Adianto dari F-PDI Perjuangan mengharapkan lulusan SMK semakin profesional dan dapat terserap di dunia kerja.



Tim Kunker Komisi X DPR foto bersama dgn guru dan para murid SDN 001

“Komisi X minta SMKN 2 Pekanbaru memberikan data anak didiknya, guru dan stafnya. Namun kita berharap kualitas para siswa terus diperhatikan. Ya...tentunya setelah lulus dari SMKN 2 Pekanbaru ini siap pakai di dunia kerja,” ujar Utut saat mengunjungi SMKN 2 Pekanbaru yang didampingi Wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit dan Kepala Dinas Pendidikan HM. Wardan MP baru-baru ini.

Sementara Kepala SMKN 2 Pekanbaru Syaril mengatakan, pihak sekolah sendiri memiliki empat point penting yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Komisi X DPR, diantaranya komitmen bantuan dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

“Empat point itu, diantaranya tentang bantuan beasiswa karena siswa di SMKN 2 Pekanbaru ini ‘kan banyak yang berasal dari ekonomi miskin, kemudian bantuan peralatan mesin untuk praktek workshop siswa,” kata Kepala SMKN 2 Pekanbaru.

Pada kesempatan itu, dia mengharapkan, pegawai honor dapat segera diangkat jadi PNS. “disekolah



Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin Waka Komisi X Utut Adianto melakukan kunjungan ke SMKN 2 Pekanbaru

ini guru sebanyak 250 guru dan separuhnya masih honor belum PNS. Kebetulan dari PMPTK ‘kan tadi ada, jadi bisa langsung diutarakan kendala-kendala sekolah,” paparnya.

Pada kesempatan itu, tim rombongan mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Pekanbaru, diantaranya SDN 001 Cinta Raja, SMPN 13, SMKN 2 Pekanbaru. Tujuan Kunker yaitu bertujuan melihat langsung perkembangan sekolah serta ingin

mengetahui kendala apa saja yang dialami siswa, guru, dan staf sekolah khususnya SMKN 2 Pekanbaru.

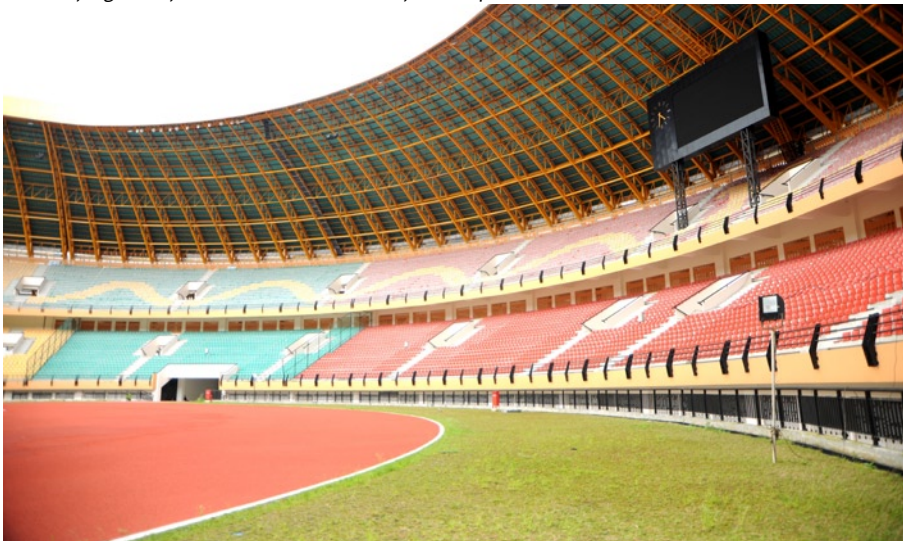
Rombongan Komisi X DPR RI terdiri atas 7 orang yang dipimpin Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) dari sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Nurul Qomar dan Muslim dari F-PD; Rully Chairul Azwar dan Popong Otje Djundjuran dari F-PG; Raihan Iskandar dari F-PS; dan Jamal Mirdad dari F-Partai Gerindra.(iw)/foto:iwan armanias

Komisi X DPR Dukung Dana PON Riau Sebesar 150 Miliar Rupiah

Komisi X telah menyetujui penggunaan APBN sebesar Rp 150 miliar untuk penyelenggaraan PON XVIII yang dijadwalkan September 2012 mendatang.



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR saat meninjau kesiapan PON di Provinsi Riau



Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) usai pertemuan dengan Gubernur Riau HM. Rusli Zainal dan Wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit beserta jajarannya, di kantor Gubernur Riau, baru-baru ini.

Kalau perihal anggaran, kata Utut, mudah-mudahan Komisi X dapat membantu dalam waktu satu-dua bulan ini sudah dapat dicairkan. "Waktu itu

kita sepakat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapat penambahan anggaran Rp 150 miliar yang dimasukkan ke dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Itu sebagai dukungan untuk penyelenggaraan saja," tambahnya.

Menurutnya, proses pencairan akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, anggaran di Kemenpora saat ini memang sangat terbatas. Karena

itu, untuk anggaran PON XVIII sudah disepakati sebesar Rp 100 miliar di dalam APBN-P 2012 di Kemenpora, jadi yang baru disetujui untuk dicairkan hanya Rp 100 miliar.

Terkait dengan masalah beban besar yang ditanggung daerah untuk penyelenggaraan event berskala nasional, Utut menjelaskan, PON XVIII ini akan diselenggarakan di Riau. Karena itu, pemerintah pusat memang harus membantu sebisa mungkin. Apapun yang terjadi, ini 'kan pekerjaan nasional, jadi harus habis-habisan, terangnya.

Utut menambahkan, perhelatan PON XVIII ini memang sangat besar dan memakan dana yang tidak sedikit. Karena itu, pihaknya berencana akan meninjau ulang tentang anggaran PON XVIII yang memberatkan itu. "Jika dibilang berat, ya..memang berat, karena 33 provinsi. Untuk itu seluruh pihak harus mendukung," tuturnya.

Sementara Gubernur Riau HM. Rusli Zainal merespon positif dukungan dana tersebut, hanya saja alokasi dana tersebut masih kurang dari yang diusulkan Pemerintah Provinsi Riau dengan nominal Rp 290 miliar. Untuk pencairan dana penyelenggaraan itu pihaknya tentu akan menindaklanjuti sesuai dengan janji Komisi X DPR tersebut. "Ini sekarang dalam proses dan sudah kami ajukan. Bahkan, saya sudah membicarakan ini secara informasi dengan Komisi X DPR," kata Zainal panggilan akrab Gubernur Riau.

Zainal menambahkan, kalau proses pembangunan sejumlah venue PON XVIII Riau masih memerlukan perhatian ekstra. Pasalnya, masih banyak progress yang perlu dipercepat pelaksanaannya. "Kita sudah membicarakan dengan Komisi X DPR. Seperti beberapa venue yang perlu mendapat perhatian, misalnya venue futsal, venue tennis termasuk juga venue boling yang masih kita bangun sekarang ini," jelasnya.(iw)/foto:iwan armanias

Ketua DPR Dukung Penyelesaian RUU PPMA

Ketua DPR mendukung Penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPMA).



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka acara Konggres ke-4 Masyarakat Adat nusantara di Tobelo, Halmahera Utara

Hal tersebut disampaikan pada saat membuka Konggres ke-4 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN IV) di Tobelo, Halmahera Utara, 19 April lalu. Dalam sambutannya, dia juga berharap bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mampu mengawal berbagai ketidakadilan yang mengancam eksistensi masyarakat adat.

Pada pembukaan KMAN IV ini, Ketua DPR yang juga meresmikan program Bedah Rumah untuk Masyarakat Kurang Beruntung, banyak di sambut meriah oleh peserta kongres, pasalnya. Ketua DPR dianggap cukup mengerti persoalan yang sangat membebani masyarakat adat selama ini, seperti berbagai sengketa dan pelanggaran hak masyarakat adat, sengketa dan pelanggaran wilayah dan sumberdaya alam, seperti perijinan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri, maupun kawasan pertambangan, dan lain-lain.

Saat ia menerima draft RUU PPMA dari Sekjen AMAN Abdon Nababan, Marzuki Alie berjanji untuk segera menyampaikan draft tersebut kepada Badan Legislasi DPR dan mendorong

pembahasannya pada Masa Sidang IV yang akan datang.

Selain itu, Ketua DPR juga memuji peran AMAN yang telah 13 tahun berdiri. Menurutnya, dengan terbentuknya AMAN, perjuangan masyarakat adat jauh lebih terorganisir dan makin dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan pembahasan berbagai RUU. Hak atas free, prior, and informed consent (FPIC) sudah semakin diterima, terutama dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan iklim, masyarakat adat makin dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap strategi nasional tentang REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation/pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan).

Pada kesempatan itu, Marzuki Alie mengajak agar masyarakat adat memperkaya pengetahuan dengan pengetahuan baru, mengadopsi teknologi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan hidup masyarakat adat. "Dengan pengkayaan pengetahuan dan teknologi, kedepan, masyarakat adat mampu mengelola sendiri kekayaan yang ada di wilayahnya secara berkelanjutan, baik pertambangan, perikanan, pertanian, air untuk pembang-

kit listrik, produk-produk budaya yang disajikan secara kreatif, dan banyak lagi," harap Marzuki Alie.

Sementara itu, KMAN IV yang diawali dengan pawai oleh berbagai utusan masyarakat adat se-nusantara dan prosesi ritual air nusantara tersebut, Bupati Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo, berharap agar masyarakat adat dari Merauke hingga Sabang, dari Miangas hingga Pualu Rotee, bersatu padu tanpa menganggap perbedaan itu sebagai pertentangan. Perlunya persatuan untuk mencapai kemajuan secara bersama-sama juga disampaikan oleh Sekjen AMAN abdon Nababan dan Ketua Panitia Kongres Rukka Sombolinggi.

Sementara, Anggota Forum Tetap PBB untuk masalah masyarakat adat Mr. Devasish Roy dan Sekjen Pakta masyarakat Adat se-Asia Joan Carling, menyampaikan apresiasinya terhadap aliansi masyarakat adat yang terus bekerja, berjuang, untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

KMAN IV yang bertema "Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat" itu dihadiri sekitar duaribu utusan Masyarakat Adat di seluruh Nusantara dan dari beberapa negara undangan seperti, Filipina, Thailand, Jepang, maupun Amerika Serikat.

Selain membuka acara Kongres AMAN di Tobelo, Ketua DPR juga bertemu dengan masyarakat Halmahera yang menyampaikan aspirasinya mengenai status Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara yang sampai saat ini belum berstatus sebagai kota. Dan dalam tanggapannya, Marzuki Alie menjelaskan bahwa status Sofifi sebagai ibukota propinsi sudah jelas diatur dalam UU. "Sedangkan peningkatan Sofifi sebagai kota atau daerah khusus ibukota provinsi, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah saja,"paparnya. (parle)



Kunjungan Kerja Komisi X DPR dipimpin Mahyuddin melakukan peninjauan ke berbagai fasilitas pendidikan budaya pariwisata dan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta, 23-25 April 2012. Foto:TT



Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Bengkulu yang dipimpin langsung Ketua Komisi VIII Ida Fauziah meninjau para ibu pembuat kue oleh-oleh khas Bengkulu di Koperasi Wanita Ende (foto kiri) dan mengunjungi desa Siaga Bencana Teluk Sepang, Bengkulu (foto kanan) 16-17 April 2012. Foto:IC



Salahsatu tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Riau yang dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto melakukan pertemuan dengan jajaran Pemrov Pekanbaru di Kantor Gubernur (foto kiri) dan meninjau SDN 01 Cinta Raja Kecamatan Sail, Pekanbaru (foto kanan). 23-26 April 2012. foto:IW